

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	3
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Radar Sampit ✓

Halaman : 02

Kompas

Kalteng Pos

Borneo News

Palangka Post

Tabengan

Perbaiki Catatan dan Temuan BPK RI

KASONGAN - Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan Nanang Suriansyah menekankan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2022.

Opini WTP tersebut adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama semua pihak dalam memperbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan.

"enindaklanjuti temuan dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, meskipun pada tahun ini pemerintah mengalami keterlambatan pada penyerahan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan akibat penyesuaian dalam penggunaan sistem aplikasi yang baru," kata Nanang, Selasa (25/7).

Menurutnya, besar harapan bersama agar opini laporan keuangan pemerintah dipertahankan untuk dapat di tahun selanjutnya.

Ia mengingatkan agar temuan dan catatan dalam pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2022 dapat segera ditindaklanjuti dan tidak terulang di tahun mendatang.

"Saya harapkan proses pelaksanaan seluruh kegiatan di tahun ini agar dilaksanakan dengan

hati-hati dan seksama serta selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku, bersamaan dengan penyerahan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan," terangnya.

Menurutnya, APBD tahun anggaran 2022 ini, pihak eksekutif juga telah menyerahkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Rancangan Daerah tentang Peraturan Bangunan Penyelenggaraan

Gedung yang merupakan regulasi yang sangat diperlukan. Terutama, untuk menjamin kelayakan dan keamanan bangunan gedung yang dibangun di wilayah Kabupaten Katingan.

Semua itu dilakukan mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun anggaran 2024 sebagai dasar dalam kebijakan penentuan arah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2024 mendatang.

"Penjelasan yang diperlukan dalam proses pembahasan bersama dengan pihak legislatif dan eksekutif. Sehingga dengan demikian proses pembahasan akan berjalan dengan lancar dan dapat memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama," pungkasnya. (sos/fm)